

Akademisi: raperdais jangan hanya terfokus pengisian jabatan

Senin, 23 Maret 2015 21:28 WIB

Oleh Luqman Hakim

Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto Istimewa)

Jogja (Antara Jogja) - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya tidak hanya terfokus pada persoalan pengisian jabatan karena belum terlalu mendesak, kata seorang akademisi.

"Tidak terlalu penting dan tidak mendesak untuk dibahas saat ini," kata dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dardias di kampus UGM Yogyakarta, Senin.

Dalam diskusi bertajuk "Politik Keistimewaan di Yogyakarta, Harta, Tahta, dan Perebutan Kuasa" itu, Bayu mengatakan masih ada tiga poin lain yang lebih penting dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) sebagai turunan dari Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY. Tiga poin itu yakni Perdas mengenai kelembagaan, tata ruang, serta kebudayaan.

"Khususnya kebudayaan yang justru memperoleh alokasi dana paling besar," kata Bayu.

Dengan hanya berfokus pada persoalan pengisian jabatan, Menurut dia, jangan sampai DPRD terkesan seolah-olah menggiring Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk segera menentukan penggantinya sebagai gubernur serta sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saat ini.

"Tidak penting, apalagi Sultan juga saat ini masih sehat segar bugar. Adik-adiknya melihat Sultan juga masih sehat," kata dia.

Menurut Bayu persoalan pengisian jabatan Gubernur DIY secara tidak langsung mulai diarahkan pada isu persoalan suksesi kepemimpinan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebab pengisian jabatan Gubernur dilakukan melalui penetapan yang secara otomatis dijabat oleh Raja Keraton.

"Jangan sampai keluar dari batasan, persoalan suksesi keraton itu biarlah menjadi urusan Raja," kata dia.

Menurut dia, pembahasan mengenai Perdas khusus menyangkut pengisian jabatan gubernur sebaiknya dihentikan apabila tidak segera menemukan titik temu dan beralih pada tiga poin pokok perdas lainnya.

"Menurut saya pembahasan itu hanya akan menghabiskan energi, sementara pembahasan persoalan lain yang lebih ditunggu masyarakat jika tidak segera dilakukan maka akan kehilangan momentum," kata kandidat Ph.D di Department of Political and Social Change Australian National University (ANU) ini.

(L007)

Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © 2015

[Cetak](#) [Email](#) [Facebook](#) [Twitter](#)

Komentar Pembaca

Kirim Komentar

Top Stories

[Pukat : dalil hukum Hakim Sarpin patut dipertanyakan](#)
[Peserta konferensi internasional tempe belajar Batik Giriyo](#)
[Sejumlah pohon tumbang akibat angin kencang](#)
[Menpan RB rencanakan pemberlakuan remunerasi progresif PNS](#)
[Menpan RB rencanakan pemberlakuan remunerasi progresif PNS](#)

Find us on Facebook



Facebook social plugin

Pendidikan

Mahasiswa UII ikuti peradilan semu di AS

Tim mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta akan mengikuti kompetisi peradilan semu ...

[Mahasiswa UNY olah roti ...](#)
[Warung Prancis UMY gelar Pekan ...](#)

Olahraga

Pemkab kembangkan Sriten sebagai lokasi paralayang

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan kawasan Embung Batara Sriten, Desa ...

[Timnas jaga kekompakan jelang ...](#)
[Pemkab sayangkan kesenjangan ...](#)

Pariwisata

Disbudpar evaluasi penarikan retribusi Gua Pindul

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengevaluasi penarikan ...

[Menkominfo dukung pengembangan ...](#)
[Pemdes Bejiharjo kurangi ...](#)

Tweets Follow

antarajogja 10 May 13
@antarajogja
Kodim 0732 Sleman gelar bakti sosial TNI KB: Sleman (Antara Jogja) - Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu m... bit.ly/10yzo1Y

antarajogja 10 May 13
@antarajogja
Puluhan ribu guru di NTT belum disertifikasi: Sekitar 64 ribu dari 82.628 guru yang tersebar 21 kabupaten/kota... bit.ly/15Shh3J

antarajogja 10 May 13

Home Jogja Terkini Politik Regional Nasional Ekonomi Olahraga Pendidikan Pariwisata Sosok Foto Forum Tentang Kami



Copyright © 2015